

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN INGGRIS DAN UNI EROPA

Pada bab dua ini penulis akan membahas mengenai hubungan yang pernah terjalin antara Inggris dengan Uni Eropa mulai dari sebelum Inggris bergabung sampai dengan referendum *Brexit* kedua pada tahun 2016 yang akan dibagi menjadi empat sub bab utama yaitu: profil negara Inggris secara umum, sejarah bergabungnya Inggris ke Uni Eropa, serta elaborasi hubungan Inggris dan Uni Eropa yang dibagi menjadi dua periode; yaitu periode 1973-2000 dan periode 2000-2016. Masing-masing bab tersebut akan dijabarkan sebagai berikut

A. Profil Negara Inggris

United Kingdom atau yang sering disebut Inggris merupakan negara kepulauan yang terletak di sebelah timur Samudra Pasifik. Dahulu, Inggris berbentuk kerajaan yang menambah wilayahnya dengan menaklukkan negara lain. Semakin berjalannya waktu wilayah Inggris semakin luas. Wilayah yang pertama bergabung adalah Wales pada tahun 1542, disusul oleh Skotlandia pada tahun 1707, kemudian terbentuklah Britania Raya yang terdiri dari England, Skotlandia, dan Wales. Wilayah Irlandia sebelumnya berada di bawah kendali Inggris, kemudian secara resmi mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1922 dan memutuskan untuk bergabung ke Britania Raya. Setelah itu, nama negara ini berubah menjadi United Kingdom (terdiri dari Britania Raya dan Irlandia Utara). Nama Resmi

Inggris menjadi United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.¹ Inggris juga dikenal selalu mempertahankan hubungan dengan bagian dari bekas kerajaan jajahannya melalui *Commonwealth*.

Gambar 2.1 Peta United Kingdom



Sumber : www.3dgeography.co.uk

Saat ini, Inggris terdiri atas beberapa wilayah yaitu Great Britain (England, Skotland, Wales), North Ireland, dan sejumlah kepulauan Kanal, Orkney, Skotland, dan Hebrides. Luas seluruh wilayah daratan Inggris adalah 93,278 sq mi (241,590 sq km) dengan populasi sebanyak 65.630.000 jiwa (2016). Wilayah England adalah wilayah terbesar yang mencakup 130.410 kilometer persegi (50.350 sq mi),

¹BBC News,"UK History," diakses dari <http://www.bbc.co.uk/history/british/> pada 1 Maret 2017

Scotland terdiri dari 30.410 sq mi, Wales and North Ireland memiliki luas jauh lebih kecil yaitu 20.758 dan 14.160 kilometer persegi (8.010 dan 5.470 sq mi).²

Kepala negara Inggris saat ini dipegang oleh Ratu Elizabeth II. Sistem pemerintahan Inggris adalah gabungan Monarki Konstitusional dan Demokrasi Parleментар. Monarki Konstitusional merupakan sistem pemerintahan berbentuk kerajaan (monarki) dibawah sistem konstitusional yang mengakui adanya raja atau ratu sebagai kepala negara. Sedangkan demokrasi parlementer adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis dimana partai yang meraih kursi terbanyak di *House of Common* bertugas membentuk sebuah pemerintahan.

Pemimpin dari partai yang memperoleh kursi terbanyak di *House of Common* akan menjadi Perdana Menteri yang menjabat menjadi kepala pemerintahan negara. Parlemen Inggris terdiri dari *House of Common* dan *House of Lords*. *House of Lords* berisi orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarga kerajaan (Ratu), orang-orang yang diberi gelar khusus, dan 26 uskup. Fungsi dari *House of Lords* adalah untuk merevisi undang-undang. Sedangkan *House of Common* adalah 651 anggota perwakilan seluruh daerah di Inggris yang dipilih langsung oleh rakyat selama periode lima tahun.³

Dari segi perekonomian, Inggris memiliki ekonomi dan perdagangan yang independen sejak revolusi industri pada abad ke-19. Sejak dulu Inggris memiliki *Partner* investasi yang penting dalam bidang produksi lokal yaitu Amerika dan

²Encyclopedia.com, "Great Britain," diakses dari www.encyclopedia.com/places/britain-ireland-france-and-low-countries/british-and-irish-political-geography/great-britain diakses pada 10 Maret 2017

³Willman, Oliver., *Op. Cit.*, hal 6

Jepang. Dari abad ke-18, Britania Raya telah menduduki posisi dominan di bidang perdagangan kerajaan Eropa, dan juga menjadi negara barat pertama yang maju di bidang industri.

B. Sejarah Bergabungnya Inggris dengan European Community

Dalam proses awal pembentukan Uni Eropa, sebenarnya Inggris memiliki beberapa peluang untuk berpartisipasi, akan tetapi Inggris memutuskan untuk tidak mengambil bagian dalam berdirinya Uni Eropa (pada saat itu masih berbentuk European Community). Awal mula terbentuknya Uni Eropa tidak luput dari Proposal Prancis yang dikenal sebagai *Schuman Declaration* mengenai pendirian *European Coal and Steel Community*. Cikal bakal pembentukan Uni Eropa diawali oleh usulan Jean Monnet, seorang negosiator Prancis kepada Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman dan Kanselir Jerman Konrad Alexander. Jean Monnet mengusulkan suatu masyarakat yang berkepentingan bersama dapat dibentuk untuk mengatur pasar batu bara dan besi baja dibawah badan pengawas yang independen.⁴

Pada tanggal 18 April 1951 melalui *The Treaty of Paris, The Schuman Plan* diterima oleh Prancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxemburg. *European Coal and Steel Community* resmi berdiri pada tanggal 10 Agustus 1952 dengan deklarasi yang ditandatangani oleh 6 negara tersebut. Tujuan Utama ECSC adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan pasar bersama.⁵ Dilatarbelakangi oleh keinginan negara-negara di Eropa yang ingin memulihkan

⁴<https://europa.eu>. (15 Desember 2016). https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en . (diakses pada 15 Desember 2016)

⁵*Ibid.*

perekonomian mereka pasca kehancuran Perang Dunia II sekaligus membentuk sebuah wadah kerjasama untuk menyatukan negara-negara aktor perang dunia agar konflik tidak terpicu kembali.

Pada awalnya Inggris menolak tawaran untuk membentuk European Coal and Steel Community. Inggris lebih memprioritaskan hubungan bilateral dengan mantan koloninya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet⁶. Pada saat itu, Inggris menganggap ECSC tidak begitu menguntungkan bagi Inggris yang sudah mempunyai ekonomi yang stabil dibanding negara anggota ECSC. Terlebih karena tujuan didirikannya untuk membuat kerjasama antar negara terkait konflik akibat perang dunia kedua guna mencegah konflik berkelanjutan antara Prancis dan Jerman. Inggris tidak merasa diuntungkan dalam tujuan tersebut.

Akan tetapi pandangan politik luar negeri Inggris mulai berubah ketika Inggris berada pada masa jabatan Perdana Menteri Harold Macmillan (1957 – 1963) setelah melihat adanya keberhasilan ECSC. Pada tahun 1973 Inggris sedang terkena dampak krisis minyak yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi di Inggris. Sedangkan disekitarnya, keberhasilan ECSC terdengar sampai ke parlemen Inggris. Beberapa keberhasilan ECSC yang menonjol adalah ECSC mampu menangani krisis minyak yang terjadi pada saat itu dengan produksi baja meningkat empat kali lipat di negara anggota ECSC. Jika dibandingkan dengan tahun 1950-an, ECSC juga meningkatkan kesejahteraan pekerja tambang.⁷

⁶Boyle C., *Loc. Cit*

⁷“Treaty establishing the European Coal and Steel Community, ECSC Treaty”. (London: EUR-Lex.2010). diakses pada 1 Maret 2017

Para menteri luar negeri negara anggota ECSC memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi dengan membentuk European Atomic Energy Community (Euratom) dan European Economic Community pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma. Tujuan utamanya adalah penciptaan suatu bentuk pasar bersama antar negara anggota. Setelah 8 tahun berjalan, pada tanggal 8 April 1965 ke-enam negara anggota mengadakan perjanjian di Brussel yang berisi penggabungan European Coal and Steel Community, Euratom, dan European Economic Community menjadi European Community.⁸

Seiring berjalannya waktu, Inggris mulai melihat Perancis dan Jerman berhasil membangun pemulihan ekonomi negaranya pascaperang dan membentuk aliansi yang kuat dengan negara anggota yang lain. Ditambah dengan berkembangnya European Coal and Steel Community menjadi European Community, Inggris merasa semakin perlu berada dalam meja kepemimpinan Eropa demi menancapkan pengaruhnya terhadap negara di Eropa. Awal ketertarikan Inggris untuk bergabung adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kerjasama ekonomi Eropa tersebut. Akan lebih menguntungkan bagi Inggris untuk masuk dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih leluasa apabila berada dalam satu hubungan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara anggota ECSC. Daripada Inggris membangun hubungan bilateral dengan setiap negara diluar suatu komunitas. Inggris kemudian menyadari PNB perkapita negara-negara yang tergabung dalam European Community dengan PNB Inggris mempunyai perbedaan yang cukup

⁸<https://europa.eu>, *Loc.cit.*

jauh. Kondisi tersebut yang kemudian melatarbelakangi keinginan Inggris untuk bergabung dengan European Community

Inggris menyampaikan permintaan untuk bergabung ke European Community pertama kali pada tahun 1961. Namun permintaan tersebut mendapat penolakan dari sejumlah negara Eropa khususnya Prancis. Kemudian tahun 1963 Inggris kembali melamar dan ditolak kembali oleh Charles de Gaulle yang menjabat sebagai presiden Prancis pada saat itu. Alasan Charles de Gaulle menolak Inggris dua kali adalah ketakutan Prancis apabila Inggris akan menjadi musuh dalam selimut bagi Eropa karna kedekatan Inggris dengan Amerika Serikat. Setelah Charles de Gaulle lengser, Inggris mengajukan permohonan kembali pada tahun 1967 pada masa kepemimpinan Edward Heath dari Partai Konservatif. Akhirnya perjuangan Inggris membuahkan hasil pada saat itu, permohonan Inggris diterima dan Inggris resmi bergabung dengan European Community pada 1 Januari 1973 bersama dengan Denmark dan Irlandia.

C. Hubungan Inggris dan Uni Eropa periode tahun 1973 - 2000

Setelah diterima dalam European Community, Inggris harus melakukan beberapa penyesuaian dengan aturan – aturan European Community. Sejak bergabung, Inggris menjadi negara yang secara aktif ikut dalam setiap kelembagaan, kebijakan, pendanaan, dan pemecahan masalah di Uni Eropa. Hubungan Inggris dan Uni Eropa juga mengalami dinamika. Beberapa kali Inggris sejalan dengan Uni Eropa akan tetapi tidak sedikit juga Inggris merasa tidak setuju dengan beberapa keputusan Uni Eropa.

Berhasilnya Inggris diterima di European Community pada saat itu dianggap sebagai suatu prestasi ditengah tengah berbagai masalah ekonomi dan keamanan Inggris dengan Irlandia Utara pada saat itu. Namun, setelah Perdana Menteri Edward Heath lengser, digantikan dengan perdana menteri Harold Wilson dari Partai Buruh dukungan keanggotaan Inggris di Uni Eropa mengalami tantangan. Sebelumnya, permohonan Inggris bergabung ke European Community memang tidak sepenuhnya didukung oleh parlemen Inggris.

Pihak oposisi yang kontra dengan Eropa adalah Partai Buruh, yang dipimpin oleh Tony Benn dan Michael Foot. Pada saat bergabung, Inggris dipimpin oleh partai Konservatif yang lebih pro terhadap Eropa, yaitu Perdana Menteri Edward Health . Setelah Perdana Menteri Edward Health lengser, posisi Perdana Menteri digantikan oleh Perdana Menteri Harold Wilson dari Partai Buruh. Setelah terpilih, sebagai pimpinan dari partai Buruh Perdana Menteri Harold Wilson menyuarakan aspirasi partainya yaitu mengadakan referendum apakah Inggris perlu untuk melanjutkan keanggotaannya di Uni Eropa.

Dalam rentang waktu 2 tahun setelah bergabung pada 5 Juni 1975 Perdana Menteri Harold Wilson mengadakan referendum tentang keanggotaan Inggris di European Community. Referendum tersebut berbunyi “Apakah Inggris akan tetap bergabung dengan European Community atau keluar“. Hasilnya, mayoritas dari daerah administratif di Inggris menjawab “Ya“ untuk tetap tinggal di European Community dengan presentase 67,2%. Sedangkan 32,8% menjawab “tidak“ untuk

keluar dari European Community.⁹ Keanggotaan Inggris di Uni Eropa pun tetap dilanjutkan.

Tahun 1980 European Community mengadakan pertemuan untuk membentuk suatu kebijakan Exchange Rate Mechanism yang mempunyai tujuan untuk mengharmonisasikan mekanisme *exchange rate* antar anggota European Community. Kebijakan ini merupakan kebijakan awal yang dibuat untuk mempersiapkan negara anggota mengadopsi mata uang tunggal di Eropa dikemudian hari. Inggris sempat mengalami ketegangan dengan Uni Eropa karena kebijakan European Rate and Exchange Mechanism. Inggris bergabung ke kebijakan tersebut pada bulan Oktober 1990.¹⁰

Salah satu program EERM adalah pengadopsian Euro sebagai mata uang tunggal di Uni Eropa. Namun, Inggris terpaksa keluar dari program kebijakan tersebut dalam kurun waktu 2 tahun. Hal tersebut terjadi setelah Inggris ditekan untuk mengganti Pounsterling menjadi Euro. Inggris berusaha mempertahankan mata uangnya dan melakukan negosiasi dengan Dewan Uni Eropa. Ketegangan berikutnya terjadi pada tanggal 16 September 1992 yang kemudian dikenal masyarakat Inggris sebagai “Black Wednesday” selama proses negosiasi Inggris dengan Uni Eropa atas perjanjian Maastricht. Hasil dari negosiasi tersebut adalah keluarnya Inggris dari pengadopsian Euro dan European Exchange Rate Mechanism¹¹.

⁹Prasetyo, Z., *Loc. Cit*

¹⁰Center, “European Union”, VibiNews, diakses dari vibinews.com/tag/uni-eropa/ pada tanggal 10 Maret 2017

¹¹*Ibid.*

Setelah referendum, Margaret Thatcher menjadi perdana menteri Inggris yang secara terbuka menyatakan sikap bahwa dirinya tidak menyetujui adanya integrasi yang mendalam. Pada masa pemerintahannya, Thatcher condong kontra terhadap integrasi ekonomi, politik, dan sosial. Pada masa pemerintahan Margaret Thatcher, dia menuding kebijakan Common Agricultural Policy tidak bermanfaat dan berlebihan. Thatcher menyebut program tersebut menghabiskan hampir 70% budget European Community pada saat itu. Terlebih lagi, dalam pelaksanaannya dinilai tidak tersalurkan secara efisien.¹²

Pada awalnya, Inggris juga mendapatkan keuntungan dari bantuan kebijakan CAP ini. CAP diperkenalkan sejak tahun 1962 yang bertujuan untuk menjamin produksi pertanian dan stabilitas pangan. Karena setelah Perang Dunia II, sektor pertanian jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor industri yang berkembang pesat. Inggris sendiri pada dasarnya merupakan negara industri yang hanya sedikit saja bertumpu pada sektor pertanian. Tetapi subsidi pertanian yang diterima Inggris dianggap tidak sebanding dengan kontribusi dana yang dibayarkan Inggris ke Uni Eropa.¹³

Ketegangan antara Inggris dan Uni Eropa mulai terjadi pada tahun 1984 karena Uni Eropa menaikkan kuota anggaran dana yang harus dibayarkan Inggris. Uni Eropa mematok nilai anggaran dana berdasarkan GDP negara tersebut. Dua negara dengan GDP tertinggi di Eropa, Prancis dan Inggris pun membayar dana kontribusi yang lebih besar dari negara lain sesuai dengan posisi GDP mereka. Inggris

¹²Deacon, M. "Britain's 40 year relationship with the EU".(London: the telegraph.2016).

¹³*Ibid.*

mengajukan protes kepada Uni Eropa karena Uni Eropa menaikkan anggaran kontribusi Inggris, sehingga Perdana Menteri Margaret Thatcher menegosiasikan hal tersebut ke Dewan Eropa. Thatcher menganggap kontribusi yang dikeluarkan oleh Inggris tidak sebanding dengan apa yang diterima Inggris dari Uni Eropa.

Hasilnya Perdana Menteri dapat memenangkan negosiasi pemotongan kontribusi dana yang dikeluarkan oleh Inggris untuk Eropa. Thatcher meminta pengurangan kontribusi dana, dari 20% menjadi sekitar 12%. Pada tahun 1980 Inggris menjadi kontributor bersih terbesar untuk anggaran Eropa.¹⁴ Tetapi Inggris menerima subsidi pertanian yang jauh lebih sedikit dari negara lain terutama Prancis.¹⁵

Pada tanggal 14 Juni 1985 Belanda, Belgia, Jerman, Luxemburg dan Prancis menandatangani Perjanjian Schengen. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan untuk secara bertahap menjamin pergerakan bebas manusia, baik warga negara di negara tersebut maupun warga negara lain di negara tersebut. Perjanjian ini menciptakan zona tanpa batas di negara anggota. Beberapa negara kemudian bergabung ke dalam perjanjian ini akan tetapi Inggris menolak untuk bergabung.¹⁶

Inggris dan negara-negara anggota Uni Eropa menjadi bagian dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization) bersama dengan Amerika, Kanada, Turkey, dan negara-negara Eropa Barat. NATO dibentuk sebagai bentuk kerjasama keamanan antar negara anggota sebagai aliansi melawan blok Soviet.

¹⁴Deacon M,*Loc.Cit.*

¹⁵Deacon M,*Loc.Cit.*

¹⁶<https://europa.eu>,*Loc.Cit*

Pada tahun 1987 negara anggota European Economic Community berkumpul di Brussels untuk menandatangani Single European Act yang bertujuan untuk mencapai sebuah pasar internal; “Area tanpa batas di mana pergerakan bebas barang, orang, jasa, dan modal terjamin“. Pencapaian pasar internal ditargetkan untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992.¹⁷

Sebagai kelanjutan dari Perjanjian Maastricht ditandatangani pada tanggal 7 Februari 1992 oleh negara anggota European Community di Maastricht, Belanda. Setelah sebelumnya, pada tanggal 9-10 Desember 1991 Dewan Eropa membuat draft perjanjian ini di kota tersebut. Setelah ditandatangani, perjanjian ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 November 1993. Perjanjian ini merupakan penanda berdirinya Uni Eropa dan sering pula disebut Treaty of European Union. Perjanjian Maastricht mendorong semakin terintegrasinya Eropa tidak hanya di bidang ekonomi akan tetapi juga bidang sosial, dan politik. Perjanjian ini menyempurnakan European Community menjadi Uni Eropa. Didalam perjanjian ini tercermin keinginan negara anggota untuk membawa Uni Eropa dibawah satu struktur hukum yang jelas dan integrasi mendalam dibidang sosial, politik, dan ekonomi (lihat lampiran 1).

Didalam perjanjian ini, terdapat tiga pilar utama dalam struktur Uni Eropa yang telah diatur didalamnya, yaitu :

1. *European Communities*, yang menangani kebijakan ekonomi, sosial, dan masalah lingkungan Uni Eropa;

¹⁷Ibid.

2. *Common Foreign and Security Policies (CFSP)*, yang menanganikan urusan luar negeri dan kemiliteran Uni Eropa; dan
3. *Justice and Home Affairs*, yang bertanggung jawab atas kerjasama mengenai pemberantasan tindak kriminal.

Didalam perjanjian ini, terdapat beberapa hal penting lain yaitu memperkenalkan rencana penggunaan mata uang tunggal, meningkatkan kekuatan parlemen Eropa dengan membuat lembaga baru yaitu Committee of the Region, dan memperkenalkan konsep “kewarganegaraan” Eropa.

Perjanjian ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Inggris John Major setahun sebelumnya yaitu tahun 1992. Dengan dibentuknya Uni Eropa berarti akan terjadi transfer kekuatan besar negara – negara anggota untuk menjadi satu dalam sebuah Uni Eropa. Inggris menandatangani perjanjian Maastricht dengan pernyataan “*opt-outs*” atau ketidaksetujuan Inggris pada opsi *single currency* (mata uang tunggal) dan bagian sosial.¹⁸ Yang dimaksud dengan “opt-out” tersebut adalah Inggris mengakui bahwa mereka adalah bagian dan ingin menjadi bagian dari Uni Eropa, akan tetapi tidak berpartisipasi dalam salah satu kebijakan tersebut. Inggris akan tetap mempertahankan mata uang poundsterling mereka.¹⁹

Sebagai hasil dari Perjanjian Maastricht, Uni Eropa membuat kebijakan Single Market yang mulai berlaku pada bulan Januari 1993. Kebijakan ini didasarkan pada

¹⁸Wilson, S. *BBC News*. 1 April 2014. <http://www.bbc.com/news/uk-politics-26515129> (diakses pada 12 Februari 2017)

¹⁹Trueman, N. C. “*A History Of The European Union and Great Britain*”. (London: Moocow Wordpress. 2015). diakses pada 12 Februari 2017

empat kebebasan; yaitu pergerakan barang, tenaga kerja, jasa, dan modal di seluruh negara anggota Uni Eropa. Hal ini berarti Inggris dapat melakukan kegiatan perdagangan secara bebas tanpa hambatan dengan negara-negara anggota Uni Eropa yang lain. Melalui perjanjian ini, Inggris mendapatkan keuntungan yang besar. Inggris dapat mengakses \$16,6 triliun per tahun dari kebijakan Single Market. Perdagangan Inggris dengan negara lain meningkat 50% sebagai hasil dari penghapusan hambatan tersebut. Uni Eropa membantu membuka pasar global sehingga banyak investasi yang masuk ke Inggris. Perusahaan Inggris mendapatkan akses penuh senilai \$24 triliun yang masuk ke Inggris. Investasi berkembang dari 23 billion Euro di tahun 1992 menjadi 159 billion Euro pada tahun 2015. Inggris otomatis menjadi negara tempat investasi modal terbesar nomor lima di dunia.²⁰

Treaty of Maastricht kemudian direvisi dan disederhanakan dalam *Treaty of Amsterdam* dan *Treaty of Nice*. *Treaty of Amsterdam* (1999) berisi perubahan perjanjian Maastricht pada bagian Justice and Home Affairs yang dibagi menjadi dua wilayah yaitu ;

1. Wilayah Kebebasan, Keamanan, dan Keadilan yang meliputi suaka, imigrasi, dan peradilan dalam hal sipil.
2. Kerjasama keamanan polisi & peradilan dalam bidang pidana dengan menjalin kerjasama dibidang tersebut antara semua negara anggota.

²⁰Lewis, *Loc. Cit.*,

Perjanjian ini juga merupakan awal dibentuknya *European Union High Representative for Foreign and Security Policy*.²¹

D. Hubungan Inggris dan Uni Eropa periode tahun 2000-2016

Selain Treaty of Amsterdam, Perjanjian Maastricht direvisi kembali dalam Treaty of Nice yang dibuat pada tahun 2001 yang berisi tentang reformasi lembaga institusi Uni Eropa dalam mempersiapkan perluasan anggota Uni Eropa yang saat itu masih 15 anggota menjadi 25 negara anggota.²²

Sebagai implementasi dari Perjanjian Maastricht, penggunaan mata uang tunggal Euro mulai resmi berlaku pada 1 Januari 1999. Akan tetapi tidak semua negara anggota bergabung didalamnya. Inggris, Swedia, dan Finlandia secara tegas dan terang – terangan menolak Euro pada saat itu.²³ Setelah itu, beberapa negara berangsur angsur mengadopsi Euro sebagai mata uang negaranya. Hingga tahun 2016 hanya Denmark dan Inggris yang tidak menerapkan Euro sebagai mata uang resminya.

Setahun setelah penandatanganan penggunaan mata uang Euro, terjadi krisis pada negara Yunani. Hal tersebut terjadi karena besarnya rasio hutang pemerintah negara-negara di kawasan Eropa yang meningkat secara signifikan terutama Yunani. Rasio utang Yunani pada tahun 2000 hanya sebesar 77% dari PDBnya. Pada

²¹<https://europa.eu>, *Loc. Cit.*,

²²<https://europa.eu>, *Loc. Cit.*,

²³Wilson, “*Britain and the EU : a long and rocky relationship*”. BBC News. 2014.

tahun 2012 naik mencapai 170% dan nilai tersebut diprediksi oleh IMF akan semakin tumbuh menjadi diatas 180% pada tahun 2013.²⁴

Parahnya lagi negara negara lain dikawasan Eropa seperti Irlandia, Portugal, Italia, Spanyol, bahkan Prancis juga mengalami kondisi yang sama. Kejadian ini membuat negara anggota Eurozone meragukan keberhasilan kebijakan tersebut. Meskipun tidak ikut menggunakan mata uang Euro, sekitar 60 persen ekspor Inggris ditujukan ke negara-negara Uni Eropa.²⁵ Sehingga Inggris juga akan terkena dampak apabila negara mitranya bangkrut.

Selain itu, hubungan Inggris dan Uni Eropa juga mengalami ketegangan pada saat pembuatan Perjanjian Lisbon (2007). Perjanjian Lisbon merupakan pembaharuan dari perjanjian sebelumnya yaitu perjanjian Nice. Beberapa pembaruan tersebut yakni memperkuat parlemen Eropa dengan pembatasan terhadap jumlah anggota parlemen, dan penggantian mekanisme pengambilan keputusan yang sebelumnya menggunakan unanimity dirubah menjadi qualified majority.²⁶ Pada tanggal 13 Desember 2007 European Council menandatangani perjanjian ini. Selanjutnya perjanjian ini baru berlaku pada bulan Desember 2009.

Perjanjian tersebut sempat ditentang oleh Inggris karena dianggap memberikan kekuatan yang terlalu besar untuk Uni Eropa²⁷ Alasan Inggris bergabung dengan

²⁴Adiningsih, Sri. Rosa Kristiadi. *macroeconomic dashboard*. (3 Juni 2015). Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM: <http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/krisis-ekonomi-eropa-terus-berlanjut/> . (diakses pada 10 Februari 2017)

²⁵Alifandi, A. *BBC News*. 10 Desember 2012. <http://www.bbc.co.uk/blogs/indonesia/london/2010/12/enam-belas-negara-uni-eropa.html> . (diakses pada 10 februari 2017)

²⁶<https://europa.eu>., *Loc. Cit.*,

²⁷Deacon, *Loc. Cit.*,

Uni Eropa adalah keuntungan ekonomi. Inggris tidak menyetujui integrasi yang terlalu menghilangkan kedaulatan negaradan memberikan Uni Eropa kekuatan yang terlalu besar karena dapat menghilangkan kekuasaan negara anggotanya. Ketidaksetujuan Inggris diperlihatkan pada saat penandatanganan kesepakatan secara seremonial. Sebanyak 26 negara anggota Uni Eropa datang untuk menandatangani perjanjian tersebut terkecuali Inggris. Inggris baru menandatangani perjanjian tersebut satu hari setelahnya.

Krisis Euro semakin memuncak ditahun 2009, menyebabkan dampak pada masalah ekonomi yang meluas ke beberapa negara sehingga menimbulkan krisis financial global.²⁸ Sentimen Inggris terhadap Eropa semakin percaya bahwa kondisi Eropa tidak akan semakin membaik. Hal ini semakin menunjukkan bahwa Uni Eropa belum mampu mengatasi krisis yang melanda negara anggota Eurozone.

Ditambah dengan adanya banjir migran yang datang ke Eropa dan menyebabkan krisis migran. Krisis tersebut terjadi akibat datangnya hampir satu juta pencari suaka (*asylum seekers*) dari berbagai negara Timur Tengah ke negara Eropa lewat laut mediterrania yang dimulai dari tahun 2014 hingga memuncak pada 2015. Inggris merupakan salah satu negara yang ikut berselisih dalam menanggapi krisis tersebut. Perselisihan memanas sehingga Perdana Menteri David Cameron mengatakan siap memimpin Inggris untuk keluar dari Uni Eropa karena masalah migran tersebut.²⁹

²⁸Alifandi., *Loc.Cit.*,

²⁹*Ibid.*

Tahun 2013 tepatnya pada 23 Januari dalam pidato kampanye beliau, David Cameron mengatakan jika Partai Konservatif memenangkan pemilu 2015, beliau menjanjikan akan berkerja keras untuk menegosiasikan kembali posisi Inggris dengan Uni Eropa dan mengadakan referendum kembali. Sebelum pemilu diadakan, hasil polling sementara menunjukkan Partai Buruh berada 5 poin didepan Partai Konservatif dalam jajak pendapat sehingga Partai Konservatif dirasa tidak mungkin menang. Tetapi ternyata hasilnya berbeda, Partai Konservatif berhasil memenangkan suara mayoritas di pemilu 2015.³⁰

Sesuai janjinya, David Cameron beberapa kali menegosiasikan posisi baru Inggris di Uni Eropa dengan beberapa permintaan. Inggris meminta kebijakan yang lebih ketat terkait dengan imigran, sistem keuangan dan keistimewaan bagi negaranya untuk menolak kebijakan Uni Eropa.³¹ Proses negosiasi berjalan dengan tidak mudah. David Cameron bersikeras menegosiasikan posisi baru bagi Inggris agar negara pimpinannya tidak sampai keluar dari Uni Eropa. Akan tetapi, negosiasi tidak berjalan sesuai dengan keinginan Inggris yang akhirnya memaksa perdana menteri untuk memutuskan keluar atau tidak dari Uni Eropa melalui referendum. Karena Inggris tidak dapat memenangkan negosiasi tersebut maka David Cameron memulai perundingan mengenai kemungkinan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Proses perundingan tersebut dilakukan pada bulan Juli ditahun 2013 dan 2014.

³⁰Murray, G., *Loc.Cit*

³¹Deacon, M., *Loc.Cit*

Proses negosiasi keluarnya Inggris didasarkan pada Article 50 Lisbon Treaty yang mengatur tentang proses keluarnya suatu negara dari Uni Eropa. Didalam pasal tersebut diatur apabila sebuah negara ingin keluar, memerlukan waktu 2 tahun untuk bernegosiasi (lihat lampiran 1). Didalam pasal tersebut disebutkan apabila sebuah negara ingin keluar maka sebelumnya negara tersebut harus memberitahu European Council dan mengadakan negosiasi withdrawal dengan Uni Eropa dengan diberikan waktu 2 tahun untuk mencapai kesepakatan.

Ditahun 2015 David Cameron telah selesai mencapai kesepakatan dengan 27 anggota Uni Eropa lain. Ditahun yang sama, perdana menteri juga menyampaikan pernyataan untuk mengadakan referendum Brexit didepan *House of Common* yang dijadwalkan akan dilaksanakan ditahun 2017. Dan di bulan November 2015, David Cameron bertemu dengan Donald Tusk, Presiden EU Council untuk merundingkan proses keluarnya Inggris. Akhirnya pada bulan Februari 2016 David Cameron mencapai kesepakatan di pertemuan rutin Uni Eropa(EU Summit 2016). Masih dibulan yang sama, David Cameron mengumumkan bahwa referendum dipercepat dan menyerahkan keputusan kepada rakyat Inggris untuk mengambil tindakan atas hal tersebut. Karena dinilai tidak berhasil memenangkan posisi Inggris yang baru di Uni Eropa sesuai janjinya, David Cameron memutuskan akan mengadakan referendum dan menyerahkan kepada masyarakat Inggris apakah Inggris akan tetap di Uni Eropa atau keluar.

Pada akhirnya referendum diadakan pada tanggal 23 Juni 2016 dengan pertanyaan “ Apakah Inggris akan melanjutkan keanggotaannya di Uni Eropa atau keluar?”. Berbeda dengan hasil referendum sebelumnya di tahun 1975, referendum

kali ini sebanyak 52% rakyat Inggris menginginkan untuk keluar dari Uni Eropa dan 48% menginginkan untuk tetap sebagai anggota. Referendum diikuti oleh sekitar 71,8 % pemilih yang merupakan jumlah partisipasi pemilih terbesar sejak pemilu tahun 1992.³²

³²BBC News,*Loc.Cit.*